

PENGARUH RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dina Satriani Fansuri^{1*}, Ali Faozin², Hetty Herawati³, Aris Azhari⁴

Sekolah Tinggi Teknologi Ilmu Komputer (STTIKOM) Insan Unggul¹²³

dinazaidan1@gmail.com^{1*}, alifaozinpci@gmail.com², hetty_siu@yahoo.com³, ariszhr@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Belanja Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon tahun anggaran 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang diolah adalah rencana kerja anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung rasio efektifitas dan rasio efisiensi rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berhasil menyusun dan merencanakan anggarannya dengan baik sampai tahap realisasi, namun realisasi anggaran tersebut telah berjalan cukup efektif, akan tetapi kurang efisien di belanja daerah, yang dikarenakan belanja lebih besar daripada pendapatan.

Kata Kunci: Rencana Anggaran, Realisasi Anggaran, Penelitian Deskriptif, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

1. Pendahuluan

Pemerintahan merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan oleh Negara untuk mengatur segala keperluan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan agar memberikan dampak positif dan berguna bagi suatu Negara tersebut. Hal ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan, pengeluaran dan kekayaan daerah yang dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Lembaga pemerintah dibentuk untuk menjalankan aktivitas pelayanan terhadap

masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan akan tetapi untuk menyediakan layanan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara khusus mengatur Keuangan Daerah yang ada di Kota Cilegon adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon. Dimana sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran memegang peran penting sebagai elemen sistem pengendalian manajemen. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien. Di Kota Cilegon, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), komponen-komponen laporan realisasi APBD yang ada di Kota Cilegon terdiri dari belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah. Namun, masih belum jelas bagaimana rencana anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan meneliti pengaruh rencana anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan studi kasus BPKPAD Kota Cilegon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Cilegon.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rencana anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Anggaran

Menurut Fuad., et al. (2020:2) Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa mendatang. Karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan.

Menurut Fadlilah., et al. (2022:2) Anggaran (Budget) merupakan perencanaan pendanaan berkala dan dijalankan menurut rencana-rencana kegiatan melalui kesepakatan bersama. Penganggaran mencerminkan program-program tercatat tentang aktifitas korporasi dituangkan dalam bentuk format numerik serta biasanya dicantumkan dalam unit harga selama tenggang masa terbatas. Budget adalah instrumen penyelenggaraan untuk meraih sasaran. Maka, budget adalah instrumen, non sasaran serta bukan untuk merubah pemimpin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Nurkholis & Khusaini (2019:21) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program. Siklus APBD yang meliputi penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. APBD disusun

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut Nasution (2019:34) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Kinerja Keuangan

Menurut Wijaya & Khoironi (2021:27) kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya secara finansial yang ditunjukkan dalam laporan keuangan. Dalam menerapkan analisis tersebut, manajemen akan memilih ukuran yang sesuai dengan strategi perusahaan. Ukuran kinerja saat ini maupun masa yang akan datang. Apabila ukuran kinerja keuangan mengalami peningkatan, maka perusahaan sukses menerapkan strategi bisnisnya.

Jenis-Jenis Anggaran

Terdapat lima jenis sistem penganggaran yang diterima umum yaitu: (Handayani 2019:45)

a. Line item budgetting

Line item budgetting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).

b. Incremental Budgetting

Incremental budgetting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama satu tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.

c. Planning Programming Budgetting system

Planning Programming Budgetting system adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terikat dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah.

d. Zero Based Budgetting (ZBB)

Zero Based Budgetting merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu.

e. Performance Budgetting

Performance Budgetting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (workload) dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur.

Tujuan Kinerja Keuangan

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Kasmir (2019) menyebutkan beberapa jenis rasio Profitabilitas diantaranya:

Ada beberapa tujuan penilaian kinerja perusahaan yang dapat ditunjukkan sebagai berikut: (Hutabarat 2020:3)

- a. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas.

Dengan mengetahui hal ini maka dapat menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

- b. Untuk mengetahui tingkat likuiditas

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

- c. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Komplek Sukmajaya Mandiri Jl. Ahmad Yani, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Bnaten 42416.

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang hubungan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data mengenai rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disusun oleh pemerintah daerah Kota Cilegon yang terjadi pada periode 2022.

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran detail tentang sejauh mana rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan memeriksa secara langsung ke lokasi penelitian pada kantor BPKPAD.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan memperoleh dengan cara tatap muka kepada bagian Keuangan kantor BPKPAD.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data, bersumber dari buku dan jurnal.

Identifikasi Variabel

Pada Identifikasi variabel terdapat beberapa variabel yaitu :

1. Variabel X 1 : Rencana Anggaran
Variabel X 2 : Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Variabel Y : Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Klasifikasi Variabel

1. Menurut Skala Pengukuran

Skala Ukur : Rasio
Variabel : Rencana Anggaran, Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Data : Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran

Keterangan : Dengan menggunakan skala rasio efektivitas dan rasio efisiensi, penulis dapat menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rumus

2. Menurut Sifat Fisik

Sifat Fisik : Kuantitatif

- Variabel : Rencana Anggaran, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
- Data : Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran
- Keterangan : Data yang dihitung berupa angka
3. Menurut Cara Pengukurannya
- Cara Ukur : Kontinu
- Variabel : Rencana Anggaran, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
- Data : Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran
- Keterangan : Untuk menghitung kinerja keuangan pemerintah
4. Menurut Cara Pengumpulannya
- Cara Pengumpulan : Primer
- Variabel : Data didapat dari kepala bidang anggaran dan akuntansi
5. Menurut Sumber Data
- Sumber Data : Intern
- Variabel : Data Anggaran BPKPAD
- Data : Data didapat Dari kantor BPKPAD
- Keterangan : Penelitian dilakukan secara langsung ke BPKPAD

daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program dan proyek untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di wilayahnya. Selain itu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga harus mengikuti prinsip-prinsip keuangan yang sehat seperti keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Terdapat beberapa unsur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Cilegon diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan total penerimaan atau sumber-sumber pemasukan keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah menjadi salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah tabel dari Pendapatan daerah kota cilegon dalam satu periode anggaran tahun 2022:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat penting bagi suatu daerah yang berfungsi untuk mengatur keuangan daerah secara tertib dan terarah. Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemerintah

Pendapatan Daerah

Kode Rek	Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
4	PENDAPATAN DAERAH	1.873.033.752.415,00	1.809.526.155.655,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	791.386.615.888,00	760.514.301.037,00
4.1.01	Pajak Daerah	645.127.680.624,00	618.589.144.208,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	13.200.000.000,00	13.626.654.602,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	31.807.000.000,00	36.297.764.695,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.508.000.000,00	4.810.035.127,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.183.328.483,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	217.000.000.000,00	216.753.661.340,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.100.000.000,00	1.975.299.685,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.322.973.127,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.071.000.000,00	774.556.600,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	112.000.000.000,00	115.520.979.344,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	257.841.680.624,00	225.323.891.205,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.976.117.200,00	17.129.088.342,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.946.790.000,00	7.803.283.142,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.976.027.200,00	6.252.226.200,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.053.300.000,00	3.073.579.000,00

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.591.510.375,00	18.591.510.375,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18.591.510.375,00	18.591.510.375,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.691.307.689,00	106.204.558.112,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	900.000.000,00	702.879.213,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000,00	4.508.670.332,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	28.630.155.528,00	9.879.726.029,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	114.967.000,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.785.033.000,00	2.200.614.534,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	110.000.000,00	8.990.098,00

	Pekerjaan		
--	-----------	--	--

4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	960.000.000,00	1.435.470.924,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	46.957.173,00	96.193.715,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	554.263.470,00	129.953.797,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	68.159.931,518,00	76.430.001,048,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Rp430.000.000,00	10.812.058,422,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.012.524.191.261,00	1.049.011.854.618,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	830.513.703.180,00	853.443.174.099,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	826.093.522,180,00	849.022.993,099,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	4.420.181.000,00	4.420.181.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	182.010.488,081,00	195.568.680,519,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	172.010.488,081,00	190.068.680,519,00

4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.000.000,00	5.500.000.000,00
-----------	------------------	---------------	------------------

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan total pengeluaran atau sumber-sumber pengeluaran keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Belanja daerah juga merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai berbagai macam program, proyek, kegiatan pemerintah dan lain sebagainya.

Berikut adalah tabel dari Belanja daerah kota cilegon dalam satu periode anggaran tahun 2022:

Belanja Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
5	BELANJA DAERAH	2.326.031.510.071	1.951.634.733.208,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.967.403.361.830	1.705.387.614.811,00
5.1.01	Belanja Pegawai	877.928.718.979	762.398.941.377,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	428.172.570,018	357.827.168.244,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	303.959.081,978	273.560.659.971,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	111.315.148,822	98.589.696.051,00

	gan Objektif Lainnya ASN		
--	-----------------------------------	--	--

5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.789.309.142	29.485.332.236,00
-----------	---------------------------------	----------------	-------------------

5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.321.691.244	1.250.831.780,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lain Pimpian DPRD serta KDH/WKDH	1.525.695.120	1.425.071.287,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	1.427.866.655	0
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	417.356.000	260.181.808,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.699.909.352	876.031.489.859,00
5.1.02.01	Belanja Barang	245.270.002.283	209.248.113.318,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	475.093.412.509	406.177.886.903,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.587.190.931	30.589.118.854,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.384.766.733	64.562.963.766,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.241.430.500	52.833.826.533,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.553.376.601	38.121.802.440,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.569.729.795	74.497.778.045,00

5.1.05	Belanja Hibah	65.771.123.499	58.721.713.575,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	63.384.883.499	57.618.316.199,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.386.240.000	1.103.397.376,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.003.610.000	8.235.470.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.383.450.000	2.161.250.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	917.000.000	4.568.700.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial ke	1.703.160.000	1.505.520.000,00

	pada		
	Kelompok Masyarakat		
5.2	BELANJA MODAL	346.325.526.181	240.989.478.397,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	74.162.248.748	22.833.485.725,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	74.162.248.748	22.833.485.725,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.655.234.278	95.005.844.824,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.775.545.831	1.537.347.000,00
5.2.02.	Belanja	21.896.427.5	18.334.071.29

5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.950.385.472	7.961.598.342,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.547.923.231	8.120.860.175,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.235.633.831	1.021.484.013,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	21.475.561.327	20.169.316.315,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	51.806.000	51.500.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.205.106.967	957.867.600,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	53.400.000	53.126.000,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	114.300.000	114.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.963.284.024	1.810.681.745,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	167.060.900	4.715.584.508,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.542.115.202	42.952.179.434,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.801.074.933	41.610.893.299,00

02	Modal Alat Angkutan	44	7,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	414.320.051	355.496.671,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	358.524.000	323.156.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.533.486.651	29.479.755.158,00

5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.741.040.269	1.341.286.135,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.613.354.494	79.196.318.317,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.914.673.850	50.215.873.254,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	21.189.275.955	18.276.757.003,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	10.319.678.039	10.046.406.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.189.726.650	657.282.060,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.352.573.459	1.001.650.097,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	99.120.070	372.840.250,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	324.564.569	247.224.700,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	60.038.820	59.515.960,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	563.000.000	322.069.187,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.302.622.060	5.257.640.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.302.622.060	5.257.640.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.302.622.060	5.257.640.000,00

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merujuk pada cara sumber-sumber yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai defisit antara pendapatan dan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Defisit ini muncul ketika jumlah total belanja daerah melebihi total pendapatan yang tersedia dalam satu periode anggaran.

Berikut adalah tabel dari Pembiayaan daerah kota cilegon dalam satu periode anggaran tahun 2022:

Pembiayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	469.497.759.456	469.497.759.456,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	469.497.759.456	469.497.759.456,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	469.497.759.456	469.497.759.456,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.500.001.800	5.500.000.555,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	0
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.500.001.800	5.500.000.555,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.500.001.800	5.500.000.555,00

Analisa Perhitungan Pendapatan Daerah

Analisa Perhitungan Pendapatan Daerah

Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
Pendapatan Daerah	Rp. 1.873.033.752.415,00	Rp. 1.809.526.155.655,00	97%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 791.386.615.888,00	Rp. 760.514.301.037,00	96%
Pendapatan Transfer	Rp. 1.102.524.191.261,00	Rp. 1.049.011.845.618,00	104%

Berdasarkan tabel perhitungan pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun Anggaran 2022, hasil dari rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 96% dikategorikan cukup efektif. Anggaran pendapatan transfer diperoleh rasio efektifitas sebanyak 104% dikategorikan sangat efektif. Hasil rasio efektifitas pendapatan daerah adalah sebanyak 97% dikategorikan cukup efektif.

Jika dilihat dari hasil analisis perhitungan pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun Anggaran 2022 telah mencapai tingkat efektifitas yang berbeda di tiap kategori. Dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup efektif, sedangkan dalam kategori pendapatan transfer tergolong sangat efektif. Dan secara

keseluruhan Pendapatan Daerah BPKPAD Kota Cilegon dikatakan cukup efektif dan berhasil mendekati atau bahkan melampaui target pendapatan yang dianggarkan.

Analisa Perhitungan Belanja Daerah

Analisa Perhitungan Belanja Daerah

Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
Belanja Daerah	Rp. 2.326.031.510.071,00	Rp. 1.951.634.733.208,00	84%
Belanja Operasi	Rp. 1.967.403.361.830,00	Rp. 1.705.387.614.811,00	84%
Belanja Modal	Rp. 346.325.526.181,00	Rp. 240.989.478.297,00	70%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 12.302.622.060,00	Rp. 5.257.640.000,00	97%

Berdasarkan tabel perhitungan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun Anggaran 2022, hasil rasio efisiensi belanja operasi adalah sebanyak 87% dikategorikan cukup efisien. Dan anggaran belanja modal diperoleh rasio efisiensi sebanyak 70% dikategorikan efisien. Sedangkan anggaran belanja tidak terduga diperoleh rasio efisiensi sebanyak 43% dikategorikan sangat efisien. Hasil rasio efisiensi belanja daerah adalah sebanyak 84% dikategorikan cukup efisien.

Jika dilihat dari hasil analisis perhitungan belanja daerah dapat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun Anggaran 2022 telah mencapai tingkat efisiensi yang berbeda-beda tiap kategori belanja. Belanja operasi dan belanja modal tergolong cukup efisien, sedangkan belanja tidak terduga sangat efisien. Meskipun terdapat selisih antara anggaran dan realisasi dalam kategori belanja, secara keseluruhan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tingkat efisiensi yang memadai.

Analisa Perhitungan Pembiayaan Daerah

Analisa Perhitungan Pembiayaan Daerah

Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 496.497.795.456,00	Rp. 496.497.795.456,00	100%
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 16.500.001.800,00	Rp. 5.500.000.555,00	33%

Berdasarkan tabel perhitungan pembiayaan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun Anggaran 2022, pembiayaan daerah memperoleh rasio efektifitas sebesar 100% dikategorikan efektif. Dan anggaran pengeluaran pembiayaan memperoleh rasio efisiensi sebesar 33% dikategorikan sangat efisien.

Jika dilihat dari hasil analisis perhitungan pembiayaan daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun Anggaran 2022 dalam hal pembiayaan telah mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Pada kategori penerimaan pembiayaan mencapai kesesuaian 100% menunjukkan pengelolaan yang efektif. Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga sangat efisien dengan realisasi mencapai sekitar 33% dari anggaran yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon dalam keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa rencana anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berhasil mencapai tingkat efektivitas dan

efisiensi yang memadai, dengan beberapa kategori bahkan melebihi target yang ditetapkan. Ini mengidentifikasi bahwa Badan Pengelolaan, Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon telah berhasil dalam merencanakan anggaran dengan baik untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal.

2. Efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efektivitasnya diperoleh antara 90%-100% termasuk dalam kriteria cukup efektif, hal ini berarti pemerintah daerah Kota Cilegon dikatakan berhasil dalam merealisasikan pendapatan dengan anggaran pendapatannya. Dan efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efisiensinya diperoleh antara 80%-90% termasuk dalam kriteria kurang efisien, yang dikarenakan pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Cilegon dikatakan kurang berhasil dalam merealisasikan belanja dengan anggarannya.

REFERENSI

- Arnianto, Dwi Destri, and Afdal Sati. 2020. "Pengaruh Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang." *Pareso Jurnal* 2(1): 36-49.
- Dona, Eka Meiliya, and Verza Ayu Lestari. 2020. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5(2): 135.

- Fuad, M et al. 2020. Anggaran Perusahaan Konsep Dan Aplikasi. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hutabarat, Francis. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan. Serang: Desanta Multiavisitama.
- Ibrahim, Lilly, Muh Nur Abdi, and Elyang Elyang. 2020. "Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017." *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 4(1): 23–49.
- Kartika, D, A B Setiawan, and I C Kusuma. 2016. "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Dan Rasio Efisiensi Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Sosial Humaniora* 7(2): 143.
- Nasution, Dito Aditya Darma. 2019. Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah). 1st ed. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurkholis, and Moh Khusaini. 2019. Penganggaran Sektor Publik. 1st ed. Malang: UB Press.
- Sulistiyowati, Chorry, Elva Fariyah, and Okta Sindhu Hartadinata. 2020. Anggaran Perusahaan Teori Dan Praktika. 1st ed. Surabaya: Scopindo.